

FRANZ MAGNIS-SUSENO SJ

## TIGA PEMIKIR "CIVIL SOCIETY": LOCKE, ROUSSEAU, HEGEL

### PENGANTAR

Lama sekali perhatian filsafat dan ilmu politik hanya berfokus pada dua wilayah: negara dan perekonomian. Baru sejak 30 tahun perhatian kembali diarahkan pada masyarakat. Peran hegemoni dalam teori perubahan sosial Gramsci, ruang publik Habermas, dampak politik feminisme dan pelbagai gerakan sosial lain, tetapi juga perhatian *komunitarisme* terhadap tradisi dan nilai-nilai masing-masing masyarakat tidak tertampung dalam dunia dwi-sektor (negara dan ekonomi) itu. Perhatian terhadap *civil society* mendapat dorongan kuat oleh salah satu peristiwa historis akhir abad ke-20 paling dahsyat, keruntuhan komunisme Soviet. Banyak analisa menegaskan

bahwa keambrukan itu juga disebabkan oleh ketidak-mampuan komunisme Soviet untuk membangun sebuah *civil society* yang kuat. Karena itu segala-galanya, terutama segala pembangunan ekonomis, harus dipikul oleh negara dan beban itu terlalu berat.

Paham *civil society* terutama dikembangkan oleh tiga filosof yang akan dibicarakan di sini: filosof pencerahan Inggris John Locke (1632-1704), filosof pencerahan Prancis Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) dan filosof "idealisme Jerman" Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Pengertian mereka tidak sama dan juga tidak dapat dikatakan bahwa ada semacam garis perkembangan dari yang pertama lewat yang kedua sampai yang ketiga. Mereka merumuskan ciri-ciri *civil society* dari kekhasan pemikiran mereka masing-masing. Locke dan Rousseau mempunyai visi cukup bertentangan tentang hakekat masyarakat, meskipun Rousseau tentu mengenal tulisan Locke. Hegel menghargai mereka berdua – dan merumuskan *civil society*-nya menurut pengertiannya sendiri lagi.

Berikut ini saya lebih dahulu selalu menguraikan unsur-unsur pokok filsafat sosial politik masing-masing tiga filosof itu – tentu hanya sejauh relevan terhadap pokok masalah kita di sini, - untuk kemudian menguraikan pengertian mereka ma-

sing-masing tentang *civil society*. Saya selalu menutup uraian dengan pertimbangan tentang relevansi masing-masing.

## 1. JOHN LOCKE: MASYARAKAT SIPIL = MASYARAKAT POLITIK

Seperti halnya setiap filosof begitu pula pemikiran politik John Locke tidak dapat dimengerti lepas dari latar belakang.<sup>1</sup> Latar belakang pemikiran Locke adalah, di satu pihak, situasi politik di Inggris pada zamannya, di lain pihak medan diskursus filosofis yang bersangkutan.

Locke lahir 1632. Sebagai orang muda ia masih mengalami kekacauan luar biasa di Inggris abad ke-17 yang memuncak dalam perang saudara 1642-1649 antar raja Charles I dan parlemen Inggris yang berakhir dengan kekalahan Charles dan pemenggalan kepalanya. Sesudah sembilan tahun kekuasaan Cromwell sebagai "Lord-Protector", Inggris 1660 kembali ke bentuk monarki di bawah putera Charles I, Charles II. Tahun-tahun berikut ditandai oleh tarik-menarik kekuatan antara raja yang menegaskan haknya yang mutlak atas dasar hak ilahi dan parlemen yang berhasil mempertahankan dan memperluas hak-haknya sendiri terhadap raja. Tari tambang itu ber-

---

<sup>1</sup> Teks terpenting tentang *civil society* terdapat dalam *Two Treatises on Government*, bab 6 dan bab 7.

akhir dalam *the glorious revolution* (1689, "Revolusi Mulia") di mana raja James II (putera Charles II) dipaksa untuk turun tahta dan diganti dengan William dari Oranje. William sekaligus dipaksa untuk menandatangani suatu "*bill of rights*" dan "*toleration act*" yang berfungsi sebagai undang-undang dasar dan banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran John Locke. Locke sendiri merupakan pemikir utama pihak anti-raja waktu itu.

Usaha para raja Inggris untuk mempertahankan hak ilahi mereka didukung secara ideologis oleh filsafat *Robert Filmer* (1588-1653). Filmer pada hakekatnya mengembalikan wewenang raja pada *auctoritas paterna* ("wewenang ayah") yang diterima oleh Adam dari Allah dan sejak itu diteruskan turun temurun kepada para raja. Filsafat Filmer berpuncak dalam dua pernyataan: Pertama bahwa kekuasaan raja bersifat mutlak, jadi bahwa ia menerimanya dari Allah sendiri dan karena itu tidak dari siapa pun di dunia dan karena itu juga tidak harus mempertanggungjawabkannya terhadap siapa pun di dunia. Dan kedua, bahwa tidak ada orang yang lahir bebas (karena setiap orang lahir sebagai bayi dan bayi menurut hukum alam berada di bawah kekuasaan orangtua).

Melawan teori Filmer, Locke menegaskan bahwa kedaulatan tidak berada di tangan raja, melainkan di tangan rakyat.

Pada hakekatnya semua orang lahir dengan hak atas kebebasan yang sama (dan kekuasaan orangtua terhadap anak mereka berakhir pada saat anak bisa bernalar sendiri). Secara kodrati dan alami setiap orang sama-sama berhak atas hidup, kemerdekaan dan hak miliknya (*life, liberty, property*). Adanya negara dengan pemerintahan bukannya karena sebuah hak ilahi raja. Kekuasaan negara bukan kelanjutan kekuasaan ayah dalam keluarga. Kekuasaan ayah berakhir apabila anak menjadi dewasa, sedangkan kekuasaan negara justru atas manusia-manusia dewasa. Seperti Thomas Hobbes, begitu John Locke mengembalikan kekuasaan negara pada sebuah kontrak atau perjanjian. Dengan bertanya *mengapa* manusia bersepakat menciptakan negara kita sekaligus akan mendapat jawaban tentang *bagaimana* negara itu harus diwujudkan.

Lagi-lagi mengikuti Hobbes, Locke bertolak dari keadaan alami. Semula manusia hidup tanpa negara, semata-mata menurut "hukum alam". Tak ada orang yang berwenang untuk memerintah atas orang lain. Di antara hak-hak alam juga termasuk hak untuk membela diri terhadap segala serangan atas hak-hak asasi tadi serta untuk menghukum penyerang itu. Akan tetapi, lama-kelamaan situasi tanpa aturan tidak tertahan lagi. Ancaman terhadap keamanan bertambah dan ancaman itu tidak bisa diatasi oleh masing-masing pihak yang terancam. Karena itu individu-individu bersepakat untuk

mendirikan sebuah lembaga yang bertugas untuk melindungi hak-hak asasi mereka. Lembaga itu disebut *commonwealth*. *Commonwealth* itu mempunyai tiga tugas: menetapkan aturan yang berlaku bagi semua (*legislative power*), melaksanakan aturan-aturan itu (*executive power*) dan mengatur hubungan dengan *commonwealth-commonwealth* lain (*federative power*).

Dengan demikian terciptalah apa yang oleh Locke disebut *civil* atau *political society*. *Civil society* itu adalah masyarakat yang hidup bersama di bawah satu sistem hukum dan satu pemerintahan. Masyarakat itu "sipil" karena semua warga mempunyai tempat aktif di dalamnya dan karena itu merupakan *citizens*. Dan masyarakat itu "politis" karena merupakan sebuah negara. Sistem itu menjamin agar masing-masing warga terlindung hak-haknya dan dengan demikian menjamin keamanan dan kebebasan mereka. Yang khas adalah bahwa *civil society* terikat oleh sebuah kontrak. Berbeda sama sekali dengan konsepsi Hobbes tentang negara sebagai Leviathan – yang tidak terikat sama sekali pada para warga – wewenang negara Locke adalah secara hakiki terbatas oleh wewenang yang diberikan oleh para warga kepadanya. Kekuasaan negara itu, pertama, dibatasi oleh parlemen karena legislatif ditentukan oleh para warga dan undang-undang harus dibuat bersama oleh parlemen yang hasil pemilihan itu dan raja. Dan

kedua, kekuasaan negara terbatas karena harus menjamin hak-hak asasi (*the inalienable rights*) para warga. Di situ juga termasuk perpisahan antara "gereja" dan "negara". Artinya, negara tidak berhak untuk mengatur kehidupan religius para warganya. Apabila negara melanggar hak-hak asasi itu, warga berhak, bahkan wajib untuk memberontak.

Dalam *civil* atau *political society* John Locke ini beberapa unsur fundamental demokrasi modern, atau kalau mau, etika politik modern, terwujud:

- Prinsip *kedaulatan rakyat*: segala wewenang atas masyarakat harus datang dari masyarakat sendiri.
- Prinsip *negara minimal* dalam arti bahwa wewenang negara dibatasi oleh rakyat yang berdaulat pada apa yang perlu agar negara dapat melakukan tujuan untuknya ia didirikan: melindungi masyarakat.
- Prinsip *pembagian kekuasaan*.; pembagian Locke yang masih kurang sempurna ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif akan dilengkapi, dijadikan *trias politik* oleh Charles de Secondat Montesquieu (1689-1755), seorang pengagum Locke dan tokoh liberalisme Prancis, dengan menambah *kekuasaan yudikatif*, artinya kehakiman (sedangkan kekuasaan federatif dimasukkan ke dalam

kekuasaan eksekutif). Prinsip pembagian kekuasaan adalah mendasar bagi negara modern. Di dalamnya berakar paham *negara hukum*.

- Prinsip bahwa kekuasaan negara adalah *terbatas*. Pembatasan itu dirumuskan dalam *undang-undang dasar* yang menetapkan secara rinci wewenang tiga kekuasaan negara itu. Dengan demikian Locke adalah bapak paham *negara konstitusional*, artinya negara yang menjalankan seluruh kekuasaannya atas dasar sebuah undang-undang dasar.
- Keterbatasan itu juga kelihatan dalam penegasan Locke bahwa rakyat boleh melawan, bahkan boleh melakukahn *revolusi* apabila negara melanggar hak-hak asasinya.

Unsur-unsur ini tak kurang menjadi tonggak-tonggak martabat kenegaraan modern: Negara hukum yang berdasarkan sebuah undang-undang dasar, jaminan terhadap hak-hak asasi, pembatasan kekuasaan negara, kedaulatan rakyat, legislatif yang dibentuk sebagai lembaga perwakilan rakyat. Hasil-hasil liberalisme politik ini sekarang masuk ke dalam paham demokrasi yang normatif bagi kenegaraan yang etis dan beradab. Locke dalam ini memberi dasar pada pengertian modern *civil society*. Masyarakat tidak lagi objek pasif pemerintahan dari atas, melainkan bersama dengan sistem susunan kuasa-kuasa

negara merupakan sebuah komunitas atau sistem interaktif. Meskipun tidak memakai istilah itu, akan tetapi pada Locke kita melihat bahwa masyarakat modern *bertanggungjawab* atas negaranya. Berbeda dengan pengertian sekarang, Locke belum membedakan *civil society* sebagai masyarakat di luar lembaga-lembaga kenegaraan dari masyarakat politik sebagai mereka yang terlibat dalam tiga kekuasaan negara. *Civil society* adalah keseluruhan masyarakat karena, apabila negara disusun menurut Locke, masyarakat itu berinteraksi aktif dengan negara.

## **2. REPUBLIK BERKEUTAMAAN JEAN-JACQUES ROUSSEAU**

Situasi daripadanya Rousseau mengembangkan filsafat politiknya berbeda dari situasi Locke. Bagi John Locke masalah yang mau diatasi adalah klaim raja atas kekuasaan mutlak. Di Prancis pun Rousseau berhadapan dengan klaim itu dan ia menolaknya. Tetapi bagi Rousseau masyarakat Prancis sudah busuk. Di belakang kebudayaan yang amat canggih tersembunyi kenyataan sosial di mana orang miskin tidak mempunyai hak-hak apa-apa, dan kehidupan masyarakat ditentukan oleh persaingan dan permusuhan. Semuanya itu karena manusia tidak bebas dan tidak sama.

Pada permulaan, dalam keadaan alami, tidak demikian keadaan manusia. Setiap orang masih hidup sendiri-sendiri, tanpa ikatan sosial, mengejar kepentingannya sendiri, tetapi dengan sikap baik dan positif terhadap sesama. Akan tetapi lama-kelamaan manusia menjadi lebih kaya, maka ia mulai saling mengiri dan curiga. Maka kehidupan bersama mulai diatur dan terjadi apa yang disebut masyarakat. Masyarakat itulah sumber segala kebusukan. Peristiwa paling mencelakakan adalah penciptaan hak milik pribadi. Hak itu menurut Rousseau merupakan "dosa asal" umat manusia yang menghasilkan masyarakat penuh kebencian dan kebusukkan.<sup>2</sup>

Tetapi ada cara untuk mewujudkan masyarakat di mana semua betul-betul bebas. Masyarakat itu sipil karena para warga akan merupakan *citizen* yang aktif menangani negara. Masyarakat sipil itu diciptakan dalam sebuah *kontrak sosial* baru.<sup>3</sup> Masyarakat itu bebas karena hidup di bawah sebuah hukum yang ditetapkan oleh rakyat sendiri. Hukum itu tidak diberikan secara sewenang-wenang oleh raja, melainkan merupakan hukum ciptaan rakyat sendiri. Undang-undang itu dibuat oleh rakyat sendiri. Maka dalam menaati hukum rakyat menaati diri sendiri dan karena itu tetap bebas.<sup>4</sup> Dengan de-

---

<sup>2</sup> Lih. *Discours on the Origin of inequality*(1755).

<sup>3</sup> Lih. *The Social Contract* (1762).

<sup>4</sup> *Contract Social* I, 8.

mikian negara bukan lagi sebuah monarki, di mana hanya satu orang, raja, berdaulat, melainkan sebuah *republik* –yang berarti urusan umum,- milik dan urusan seluruh rakyat di mana kedaulatan rakyat, kekuasaan rakyat atas dirinya sendiri, terwujud.

Di sini memang muncul masalah. Masalahnya ialah bahwa sebenarnya tidak ada itu "rakyat". Yang ada adalah jutaan orang yang bersama-sama merupakan rakyat. Dan seperti kita ketahui, pada umumnya setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda. Lalu bagaimana mereka dapat menetapkan undang-undang yang disetujui oleh semua? Rousseau memecahkan masalah ini dengan membedakan antara *kehendak masing-masing* dan *kehendak umum (volonté générale)*. Yang pertama menyangkut kepentingan masing-masing dan karena itu tidak pernah sama. Tetapi yang kedua menyangkut kepentingan bersama, seperti kepentingan akan adanya keamanan, kenyamanan dan keadilan. Kehendak itu sama dan satu dalam seluruh rakyat. Kehendak umum itulah yang dirumuskan dalam hukum. Namun Rousseau mengakui bahwa perhatian pada kehendak umum memang memerlukan *keutamaan*, kesediaan untuk tidak membatasi diri pada kepentingan pribadi sendiri. Orang yang hanya memikirkan diri sendiri tidak mampu untuk menangkap kehendak umum. Diperlukan *patriotisme*, cinta pada negaranya serta semangat untuk berkorban

baginya. Bagaimana kehendak umum bisa diketahui? Apa yang merupakan kehendak umum adalah hasil saringan dari segala macam kehendak melalui mayoritas. Kalau ada perbedaan pendapat, maka diadakan *voting*, dan yang dipilih oleh mayoritas itulah kehendak umumnya. Akhirnya tersaring kehendak umum yang menjadi hukum yang diakui semua.

Seorang egois memang akan mengalami kesulitan. Hanya orang yang berbudi luhur, yang berkeutamaan, akan mendahulukan kepentingan umum terhadap kepentingannya sendiri. Oleh karena itu masyarakat sipil Rousseau adalah *republik berkeutamaan*. Masyarakatnya bersemangat patriotisme. Mereka yang tidak bersedia mendahulukan kepentingan umum perlu dididik, dan kalau tetap tidak mau dididik menjadi patriot, mereka harus disingkirkan. Masyarakat harus dipaksa untuk mengembangkan sikap-sikap yang memungkinkan mereka mendukung hukum sebagai hukumnya sendiri dan dengan demikian untuk menjadi bebas. Dalam hubungan ini Rousseau menulis bahwa masyarakat "harus dipaksa untuk bebas".<sup>5</sup> Untuk menumbuhkan semangat patriotisme dan taat pada hukum Rousseau menganggap perlu diciptakan sebuah "agama sipil" (*religion civile*), artinya upacara-upacara (seperti kenaikan bendera) yang menjunjung tinggi patriot-

---

<sup>5</sup> lb.

isme, cinta pada tanah air dan kesediaan untuk berkorban baginya. Karena tahu bahwa dalam kenyataan mayoritas biasanya justru tidak memiliki keutamaan tinggi, melainkan merupakan bagian paling bodoh dalam masyarakat, bisa juga orang yang bercita-cita luhur, seperti Jean Calvin di Geneva, sendirian memasang sistem hukum dan tatanan kenegaraan yang benar, yang kemudian ditaati.

Masyarakat sipil ini berbeda dari masyarakat sipil Locke. Pada Locke negara diciptakan dan dipertahankan demi kepentingan para individu yang menciptakannya. Pada Rousseau tujuan negara melampaui tujuan masing-masing individu karena merupakan kehendak umum, tujuan seluruh rakyat. Masyarakat sipil ini penuh semangat patriotisme. Orang mau berkorban demi rakyat dan karena itu bagi negara. Sering dikritik bahwa dengan demikian Rousseau membuka pintu pada kediktatoran sebuah elit puritan-ideologis atas nama keutamaan, seperti terjadi dalam Revolusi Prancis di bawah Robbespierre. Konsepsi Lenin dan cita-cita Republik Islam Iran merupakan contoh negara di mana sebuah elit ideologis berkuasa. Republik berkeutamaan bisa menjadi pembunuh karena atas nama kehendak umum atau, itu sama, a. n. kemurnian ideologis negara bisa menyingkirkan semua yang dinilai tidak berkeutamaan.

### 3. HEGEL, MASYARAKAT SIPIL

Baik Locke maupun Rousseau memahami seluruh masyarakat sebuah negara sebagai *civil society*, termasuk aparat pemerintahannya. Apabila rakyat melakukan segala macam kegiatan di bawah payung hukum dan kekuasaan eksekutif menurut sebuah undang-undang dasar (Locke), atau, di mana rakyat patriotik sendiri mengurus kekuasaan negara dan dengan demikian merupakan kesatuan sosial yang menjalankan sendiri kehidupannya, yang bukannya berada di bawah hukum yang dipasang dari luar oleh seorang raja, itulah *civil society*. Istilah ini cukup tepat karena masyarakat itu sendiri bersifat politik, terutama dalam konsepsi Rousseau.

Tetapi di zaman Hegel situasi berubah. Zaman Hegel adalah zaman pasca Revolusi Prancis. Dan meskipun para raja pada waktu itu mencoba untuk membendung dobrakan-dobran yang dibawa olehnya, akan tetapi usaha mereka hanya berhasil untuk sementara. Akhirnya cita-cita Revolusi Prancis berhasil menjadi tolok ukur kenegaraan modern. Hegel, seperti sebelumnya Kant, amat terkesan oleh Revolusi Prancis dan meskipun mengkritik ekstremisme teroristiknya, ia memandang cita-cita Revolusi Prancis sebagai kemajuan besar. Ia juga yakin bahwa tak mungkin manusia mundur lagi ke belakang cita-cita itu. Cita-cita Revolusi Prancis yang dipersingkat

dalam semboyan amat enak *liberté, égalité, fraternité* (kebebasan, kesamaan, persaudaraan) adalah negara yang sudah dicerahkan, jadi negara *rasional*, dan negara rasional adalah negara yang menjamin *kebebasan* para warganya. Rasionalitas itu dilembagakan melalui *undang-undang dasar* (yang pertama kali dituntut John Locke) serta sebuah pemerintahan berdasarkan pembagian kekuasaan (*trias politik*) yang mewujudkan *kedaulatan rakyat*, jadi di mana hukumnya mengungkapkan *kehendak umum* (*volonté générale*, Rousseau). Mengikuti mereka Hegel mengandaikan bahwa kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak mengambang di atas masyarakat, melainkan mengekspresikan kehendak masyarakat<sup>6</sup> (meskipun Karl Marx kemudian, tidak tanpa alasan, akan mengkritik bahwa "negara" Hegel justru mengambang di atas masyarakat, daripada menyatu dengannya<sup>7</sup>).

Oleh karena itu Hegel mampu maju dalam pengertian *civil society*. Ia tidak lagi memahaminya sebagai masyarakat dalam kesatuan dengan kenegaraannya, melainkan sebagai wilayah kehidupan masyarakat tersendiri. Tersendiri dalam arti, bahwa masyarakat sipil adalah masyarakat justru sejauh tidak

<sup>6</sup> Hegel membahas *civil society* dalam bukunya "Grundlinien der Philosophie des Rechtes" ("Philosophy of Right") § 182 & § 256.

<sup>7</sup> Dalam "Critique of Hegel's Philosophy of State" dan "Critique of Hegel's Philosophy of Right. Introduction".

terkait dengan kenegaraan. Maka *civil society* dalam pengertian Hegel adalah segala kehidupan sosial, segala kegiatan yang di satu pihak tidak termasuk kehidupan berkeluarga, dan di lain pihak tidak terkait dengan kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif). Dengan demikian *civil society* meliputi kehidupan dan kegiatan di luar rumah, jadi pekerjaan profesional, berbelanja, memakai fasilitas umum, misalnya bisa untuk perjalanan, untuk kegiatan rekreatif seperti nonton pertandingan olah raga, berolah raga sendiri, menjadi wisatawan, lalu juga kehidupan budaya dalam arti kesenian, ikut konser, opera, pertunjukkan sandiwara, ikut ceramah publik. Di dunia sekarang media termasuk *civil society*.

Hegel menunjukkan bahwa *motivasi* orang bertindak dalam *civil society* adalah berbeda dari dalam keluarga dan dalam negara. Dalam *keluarga* ikatannya adalah cinta kasih yang dirasakan secara spontan dan yang tidak perlu ditetapkan dalam sebuah peraturan resmi. Para pejabat *negara* bermotivasi memajukan kepentingan umum. Tetapi dalam *civil society* para pelaku, ya segala unsur dan kelompok masyarakat, bertindak menurut kepentingan mereka masing-masing. Dalam keluarga orang –tentu secara ideal– selalu berkegiatan didorong oleh cintakasih bagi seluruh keluarga. Dalam dimensi politis –lagi-lagi menurut cita-citanya– orang bertindak demi keselamatan dan kemajuan masyarakat sebagai keseluruhan. Tetapi

dalam *civil society* orang bergerak didorong oleh kepentingan egoisnya. Ia misalnya berkomunikasi dengan penjual obat di apotik bukan untuk membuat dia gembira atau karena ia senang ngobrol, melainkan karena memerlukan obat dan si penjual obat adalah sarana untuk mencapainya. Begitu halnya kita berkomunikasi di tempat kerja, kalau beli karcis KA, bahkan kalau ke gereja atau ke masjid. Motivasi adalah keperluanku sendiri, bersama keluargaku. Karena itu Hegel menyebutkan *civil society* sebagai "sistem kebutuhan". Motivasi *civil society* adalah *egoisme* masing-masing pelaku. Manusia berkomunikasi satu sama lain secara *fungsional*, artinya bukan karena ia meminati si penjual tiket itu, melainkan karena fungsinya sebagai penjual tiket dan tiketlah yang dibutuhkan.

Namun di sini muncul masalah. Apakah masyarakat bisa bersatu, bisa, misalnya, menuntut pengorbanan-pengorbanan yang harus diberikan semua anggota baginya, apabila motivasinya hanyalah kepentingannya sendiri? Locke barangkali akan menjawab bahwa perlindungan oleh negara sudah cukup memberi motivasi untuk mau berkorban seperlunya demi masyarakat. Rousseau, sebaliknya, dan begitu pula beberapa filosof "komunitaris" seperti Michael Walzer dan Charles Taylor, menuntut agar masyarakat, para warga negara, mengembangkan keutamaan-keutamaan "republikan", jadi patriotisme dan rasa tanggungjawab terhadap negaranya. Bagaimana-

na Hegel memecahkan masalah ini? Hegel menunjuk pada negara. Menurut Hegel kalau hanya ada *civil society* sebagai "sistem kebutuhan", kekuatan-kekuatan sentrifugal akan menang dan masyarakat akan terpecah-belah. Maka perlu ada negara yang bermotivasi kepentingan umum. Melalui *hukum* negara memberikan kerangka bagi kebebasan para warga (sebuah gagasan yang juga ada pada Hobbes). Hukum adalah batas kebebasan para warga negara. Tetapi, dan itu barunya hukum pasca Revolusi Prancis, hukum yang baik justru disusun menurut kepentingan masyarakat, jadi untuk menjamin keamanan dan kebebasan yang sebesar-besarnya. Begitu pula Hegel mengandaikan bahwa kekuasaan eksekutif dan birokrasi dimotivasi oleh kepentingan umum. Jadi negara adalah unsur yang, melalui hukum, membendung kecenderungan-kecenderungan anarkistik masyarakat sipil yang hanya didorong oleh egoisme para peserta.

Maka adalah Hegel yang memahami *civil society* sebagai lapisan kehidupan masyarakat tersendiri, terpisah dari, dan berhadapan dengan, negara. *Civil society* adalah wilayah di mana kehidupan berlangsung kalau mereka tidak di rumah mereka sendiri.. *Civil society* itu tidak politis. Orang mengejar kepentingan sendiri, tetapi merasa aman karena diwaspadai oleh negara yang sudah tercerahkan, artinya yang sistem hu-

kum dan pemerintahan sudah republikan dalam arti Immanuel Kant.

#### 4. RANGKUMAN

Kalau kita melihat kembali perkembangan paham *civil society* dari John Locke ke Jean-Jacques Rousseau dan ke Georg Wilhelm Friedrich Hegel, kita melihat kesadaran yang semakin besar akan peranannya. Locke untuk pertama kali menangkap *civil society* sebagai *political society*, sebagai masyarakat yang berpolitik karena mengontrol negara. Paham itu mendobrak kerangka lama yang dualistik: Raja, atau penguasa dan kelas bangsawan berhadapan dengan masyarakat yang sendiri sama sekali tidak politis. Rousseau meningkatkan peran *civil society*. Masyarakat tidak hanya sekadar mengontrol, melainkan secara aktif menentukan sistem hukum dan menetapkan orang-orang yang akan memimpinya. Maka Rousseau menuntut dari orang-orang dalam *civil society* keutamaan patriotik. Hegel lalu menemukan *civil society* sebagai wilayah kehidupan masyarakat tersendiri yang tidak langsung berkaitan dengan bidang politik.

Hegel mundur dari konsepsi Rousseau. Ia sangat skeptis terhadap pengaruh langsung masyarakat atas negara. Ia tidak percaya pada kehendak umum yang nyata-nyata ada dalam

warga negara. Sesuai dengan filsafat rohnya Hegel memahami kehendak umum sebagai terungkap dalam pemerintahan dan birokrasi, asal saja sistem hukum menunjang kebebasan. Kehendak umum bukan realitas empiris, seakan-akan dia nyata-nyata duduk dalam semua warga negara. Melainkan kehendak umum diwujudkan dari kehendak-kehendak individual masyarakat oleh Roh Objektif, seakan-akan dari di belakang layar.

Rupa-rupanya Hegel takut kalau masyarakat terlalu berpolitik. Namun dengan demikian Hegel mengancam hakekat republikan negaranya. Negara dalam kenyataan mengambang di atas rakyat dan tidak ada alasan mengapa negara itu mengungkapkan kehendak umum rakyat, karena Hegel tidak memakai sarana-sarana kontrol demokratis. 160 tahun kemudian Habermas akan mengembalikan fungsi politik *civil society*. *Civil society* juga tempat segala macam diskursus tentang apa yang hendak dilakukan oleh negara. Diskursus itu berlangsung dalam media, dalam pertemuan-pertemuan, dalam komentar terus menerus terhadap kebijakan pemerintah dan prestasi parlemen. Habermas mengatakan bahwa *civil society mengepung* para politisi sehingga tidak dapat begitu saja diabaikan. Baru *civil society* ini dapat menentukan arah negara dan menggagalkan setiap usaha untuk menempatkan negara mengambang di atas kepala-kepala rakyat.

## PUSTAKA:

John Locke, *Second Treatise of Government* (1690, khususnya bab 6-7).

Jean-Jacques Rousseau, *Discourse on the Origin of Inequality* (1755).

----- *The Social Contract* (1762, terutama buku pertama)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Philosophy of Right* (*Grundlinien der Philosophie des Rechts*, 1820, pasal 182-208).

Sebagai bacaan pembantu dapat dibaca: Franz Magnis-Suseno 1987, *Etika Politik. Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, Bab 12 dan 13.

